

JAF (Journal of Accounting and Finance), Vol.7, No.2, pp. 57-83, 2023

Penerapan GRI Standards dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer

Leonardo Ivan Lasmana^{1*}, Ririn Breliastiti², and Temy Setiawan³

¹Affiliation: Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

²Affiliation: Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

³Affiliation: Universitas Bunda Mulia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: lasmanaleonardo@gmail.com

Received: 26 Mei 2023; **Revised:** 15 Agustus 2023; **Published online:** 29 September 2023

To cite this article: Lasmana, L.I., Breliastiti, R., & Setiawan, T. (2023). Penerapan GRI Standards dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, vol.7(2), pp 57-83. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i2.6023>

To link to this article: <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i2.6023>

ABSTRACT

This study aims to analyze, compare, and conclude how consumer non-cyclicals public companies apply the GRI Standards indexes in their sustainability report and what sustainability issues are disclosed by the company. This research was made in addition to fulfilling an assignment from the Governance and Sustainable Business course, as well as to find out whether consumer non-cyclicals companies disclose topic-specific standards such as. The research method used is descriptive qualitative method which originates from the sustainability reports of 5 listed companies in the consumer non-cyclicals sector in 2021. The five companies have made disclosures on topic-specific standards but some of the companies still does not comply with the GRI Standards.

Keywords: GRI, Sustainability Report, Topic-specific Standards

PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan usaha saat ini merupakan sebuah topik yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Di Indonesia, perusahaan terbuka wajib menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. OJK juga memberikan pedoman

teknis penyusunan laporan keberlanjutan. Selain mengacu pada OJK, perusahaan juga mengacu pada standar pelaporan yang dibuat oleh *Global Reporting Initiatives (GRI)* yaitu GRI Standar sebagai panduan dalam menyusun laporan keberlanjutan.

Dengan adanya peraturan mengenai kewajiban perusahaan membuat laporan keberlanjutan yang dapat dikatakan belum begitu lama ditetapkan, belum semua perusahaan publik membuat laporan keberlanjutan dan hanya membahas isu-isu keberlanjutan dalam laporan tahunannya saja. Dengan begitu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini khususnya kepada perusahaan-perusahaan publik di sektor barang konsumen primer yang produknya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan publik di sektor barang konsumen primer mengungkapkan isu-isu keberlanjutan dalam laporan keberlanjutannya sesuai dengan GRI Standar.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang laporan keberlanjutan dengan GRI Standar sebagai panduan penyusunan laporan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus ke perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di IDX sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) dalam kategori papan pencatatan utama dan jumlah saham beredar lebih dari 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham, dengan pertimbangan bahwa populasi penelitian akan menggambarkan emiten-emiten yang telah memiliki skala usaha dan kapitalisasi yang besar. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan atas *GRI Standards* dan peraturan yang ditetapkan, penelitian ini menjadi sebuah penelitian terbaru yang membahas penerapan *GRI Standards* pada laporan keberlanjutan perusahaan barang konsumen primer tahun 2021.

KAJIAN LITERATUR

Sustainability Reporting

Sustainability reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta mengkomunikasikan isu-isu keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan ini digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk tujuan perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainable reporting* merupakan laporan non-finansial sebagai acuan untuk melihat kinerja perusahaan dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan keberlanjutan dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dengan laporan tahunan.

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang artinya perusahaan memiliki tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam seluruh dimensi fungsional perusahaan terhadap segala bentuk dampak yang dihasilkan perusahaan kepada lingkungan. Oleh karena itu tanggung jawab sosial tidak hanya berfokus pada konsep pemberian dana kepada lingkungan sosial namun juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan pelestarian dan pemberdayaan terhadap lingkungan dan sosial.

GRI Standards

GRI Standards merupakan sebuah standar pedoman untuk penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan untuk mengungkapkan secara publik dampak dari kegiatannya yang paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat atau sosial. Dampak yang dilaporkan juga termasuk dampak terhadap hak asasi manusia serta cara organisasi mengelola dampak tersebut. Pengungkapan ini dilakukan dengan tujuan transparansi dari dampak organisasi atau perusahaan serta untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Nantinya laporan keberlanjutan dapat digunakan oleh pengguna informasi untuk menilai dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang dampak dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Informasi laporan keberlanjutan yang dimuat sesuai dengan pedoman dari *GRI Standards* dapat membantu pengguna dalam menilai keberlanjutan usaha sebuah organisasi atau perusahaan. Selain itu pemangku kepentingan sebagai pengguna laporan juga dapat menilai bagaimana mereka dapat terdampak oleh kegiatan operasional organisasi atau perusahaan tersebut.

GRI Standards disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan yang disusun menjadi tiga seri: Standar Universal GRI, Standar Sektor GRI, dan Standar Topik GRI. Di mana Standar Universal digunakan oleh semua organisasi saat menyusun laporan yang sesuai dengan *GRI Standards*. Standar Sektor digunakan organisasi sesuai dengan sektornya masing-masing dan Standar Topik sesuai dengan daftar topik material.

Tabel 1. Struktur GRI Standards

Seri	Penjelasan
Standar Universal Seri 100	GRI Seri 100 terdiri dari: <u>101 Landasan</u> GRI 101 menetapkan Prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan dan kualitas laporan yang mencakup persyaratan untuk menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar GRI, dan menjelaskan bagaimana Standar GRI dapat digunakan. GRI 101 mencakup klaim spesifik yang diperlukan oleh organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan sesuai dengan Standar dan bagi mereka yang menggunakan Standar GRI terpilih untuk melaporkan informasi secara spesifik. <u>102 Pengungkapan Umum</u> GRI 102 digunakan untuk melaporkan informasi kontekstual terkait organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutan termasuk informasi tentang profil, strategi, etika, integritas organisasi, tata kelola, praktik pelibatan pemangku kepentingan, serta proses pelaporan. <u>103 Pendekatan Manajemen</u> GRI 103 digunakan untuk melaporkan informasi tentang bagaimana sebuah organisasi mengelola topik material yang dirancang untuk masing-masing topik material dalam laporan keberlanjutan. Standar Topik Spesifik Seri 200 (Ekonomi) Seri 300 (Lingkungan) Seri 400 (Sosial)

Sumber: GRI (2023)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dengan peraturan Nomor 51/POJK.03/2017. Peraturan ini menjelaskan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. prinsip investasi bertanggung jawab;
- b. prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- d. prinsip tata kelola;
- e. prinsip komunikasi yang informatif;
- f. prinsip inklusif;
- g. prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas;
- h. prinsip koordinasi dan kolaborasi.

OJK membuat indeks pedoman bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dengan laporan tahunan dengan memuat informasi paling sedikit terkait:

- a. penjelasan strategi keberlanjutan;
- b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
- c. profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. penjelasan Direksi;
- e. tata kelola keberlanjutan;
- f. kinerja keberlanjutan;
- g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
- h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada;
- i. tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menggunakan POJK sebagai pedoman menyusun laporan keberlanjutannya, perlu mengungkapkan informasi-informasi terkait keberlanjutan sebagaimana telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

METODOLOGI

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif melalui observasi yang dilakukan terhadap laporan keberlanjutan lima perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada *GRI Standards* yang menjadi panduan penyusunan laporan keberlanjutan atas pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada para pengguna informasi laporan keberlanjutan. Penelitian akan berfokus pada standar topik spesifik ekonomi (GRI 200), topik lingkungan (GRI 300), dan topik sosial (GRI 400) dalam *GRI Standards*.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data-data laporan keberlanjutan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, subjek yang diteliti adalah sektor barang konsumen primer yang kegiatan usahanya sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat umum sehari-hari. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di papan pencatatan utama dengan jumlah lembar saham beredar di atas 30.000.000.000 lembar saham dan yang menyusun laporan keberlanjutan. Dalam hal ini, perusahaan yang memenuhi ketentuan peneliti adalah:

Tabel 2. Perusahaan Sampel

Kode	Nama Perusahaan	Tanggal Pencatatan	Jumlah Saham
HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	15 Agustus 1990	116.318.076.900
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	15 Januari 2009	41.524.501.700
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	11 Januari 1982	38.150.000.000
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	10 Oktober 2018	36.897.901.455
BWPT	Eagle High Plantations Tbk.	27 Oktober 2009	31.525.291.000

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2023)

Pengumpulan data *sampling* dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel yaitu: (1) Perusahaan publik di sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) (2) Perusahaan menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan tahun 2021 (3) Perusahaan tercatat di papan pencatatan utama dalam Bursa Efek Indonesia dengan lembar saham beredar di atas 30.000.000.000 lembar.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui *website* Bursa Efek Indonesia (IDX) dan *website* perusahaan yang sebelumnya telah dipilih untuk mengunduh laporan keberlanjutan setiap perusahaan terpilih. Peneliti juga menyiapkan data berupa dokumen *GRI Standards* yang memuat standar topik dan panduan penyusunan laporan keberlanjutan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data kualitatif yang telah ditetapkan sebagai sampel yaitu dengan melakukan *content analysis* terhadap laporan keberlanjutan setiap perusahaan sampel dan membandingkan apakah perusahaan-perusahaan sampel telah mengungkapkan standar topik spesifik GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan perusahaan terkait. Kemudian peneliti merangkum dan melakukan pembahasan atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah melakukan *content analysis* terhadap laporan keberlanjutan setiap perusahaan sampel, peneliti mengolah data dan mendapatkan hasil penerapan standar topik spesifik GRI dalam perusahaan-perusahaan sampel sebagai berikut:

Tabel 3. Penerapan Standar Topik Spesifik GRI

Penerapan GRI Standards														
GRI 200					GRI 300					GRI 400				
HMSP	AMRT	UNVR	GOOD	BWPT	HMSP	AMRT	UNVR	GOOD	BWPT	HMSP	AMRT	UNVR	GOOD	BWPT
GRI 201: Kinerja Ekonomi					GRI 301: Material					GRI 401: Kepegawaian				
201-1	✓	✓	✓	✓	301-1					401-1	✓	✓	✓	✓
201-2	✓			✓	301-2			✓		401-2	✓	✓		✓
201-3	✓			✓	301-3			✓		401-3		✓		✓
201-4	✓			✓	GRI 302: Energi					GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen				
GRI 202: Keberadaan Pasar					302-1	✓	✓	✓	✓	402-1				
202-1	✓	✓	✓		302-2					GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
202-2					302-3	✓	✓	✓		403-1	✓	✓	✓	✓
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung					302-4	✓		✓		403-2	✓	✓		✓
203-1					302-5					403-3	✓	✓	✓	✓
203-2		✓	✓		GRI 303: Air dan Effluen					403-4	✓			
GRI 204: Praktik Pengadaan					303-1	✓			✓	403-5	✓			
204-1	✓		✓		303-2	✓		✓	✓	403-6	✓		✓	
GRI 205: Antikorupsi					303-3		✓	✓	✓	403-7	✓			
205-1	✓				303-4				✓	403-8		✓	✓	✓
205-2	✓	✓	✓	✓	303-5			✓	✓	403-9	✓			✓
205-3	✓	✓	✓	✓	GRI 304: Keanekaragaman Hayati					403-10				✓
GRI 206: Perilaku Antipersaingan					304-1				✓	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan				
206-1					304-2			✓	✓	404-1	✓	✓	✓	✓
GRI 207: Pajak					304-3				✓	404-2	✓	✓	✓	✓
207-1					304-4				✓	404-3	✓			
207-2					GRI 305: Emisi					GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara				
207-3					305-1		✓	✓	✓	405-1	✓	✓	✓	✓
207-4					305-2	✓	✓	✓	✓	405-2	✓	✓		
					305-3		✓			GRI 406: Nondiskriminasi				
					305-4	✓	✓			406-1	✓	✓		
					305-5			✓		GRI 407: Kolektif				
					305-6					407-1	✓			
					305-7					GRI 408: Pekerja anak				
					GRI 306: Effluen dan Limbah					408-1	✓	✓	✓	
					306-1					GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja				
					306-2					409-1	✓	✓	✓	
					306-3					GRI 410: Praktik Keamanan				
					306-4					410-1				
					306-5					GRI 411: Hak Masyarakat Adat				
					GRI 306: Limbah					411-1				
					306-1	✓				GRI 413: Masyarakat Setempat				
					306-2	✓		✓	✓	413-1	✓	✓	✓	✓
					306-3	✓				413-2				
					306-4	✓				GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok				
					306-5	✓				414-1	✓			
					GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok					414-2				
					308-1					GRI 415: Kebijakan Publik				
					308-2					415-1				
										GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan				
										416-1	✓		✓	
										416-2	✓			
										GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan				
										417-1	✓	✓	✓	
										417-2	✓	✓		
										417-3	✓			
										GRI 418: Privasi Pelanggan				
										418-1	✓			

Sumber: Hasil olahan peneliti

Pembahasan

PT HM Sampoerna Tbk.

Sebagai perusahaan manufaktur, perdagangan, pengangkutan/ distribusi, pergudangan, serta aktivitas jasa penunjang lainnya di bidang industri produk tembakau yang telah memulai usahanya sejak 1913 dan mendirikan perusahaan pada tahun 1963. Perusahaan ini *go public* pada 15 Agustus 1990 dengan kode saham HMSP. Dalam penyusunan laporan keberlanjutannya di tahun pertama, HM Sampoerna menggunakan *GRI Standards* dengan mengungkapkan informasi dan dampak keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Topik spesifik yang dilaporkan mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI 200

Dalam topik ekonomi (GRI 200), HM Sampoerna mengungkapkan **GRI 204** tentang Praktik Pembelian dalam Indeks *GRI Standards* nya namun tidak menjelaskan secara spesifik pengungkapan indeks ini di halaman tertentu namun dalam laporan keberlanjutannya dijelaskan bahwa perusahaan melakukan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pada komunitas petani dan pemasok yang ada dalam jangkauan perusahaan yang mencakup 22 ribu petani tembakau dan cengkih yang memiliki risiko keberlanjutan paling signifikan dalam rantai pasoknya.

Selain itu HM Sampoerna juga mengungkapkan **GRI 205** tentang Anti Korupsi pada 205-2 terkait Komunikasi dan *training* kebijakan dan prosedur anti korupsi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan tahun 2021 menjelaskan bahwa pelatihan Anti-Suap dan Korupsi dilakukan perusahaan melalui internet – e-learning. Tidak ditemukan adanya pengungkapan 205-1 tentang operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi dan pengungkapan 205-3 tentang insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Terkait topik spesifik ekonomi dalam GRI 200 lainnya seperti GRI 201 tentang Kinerja Ekonomi, HM Sampoerna tidak menjelaskan kinerja ekonomi secara spesifik dalam laporan keberlanjutannya dan tidak mencantumkannya dalam indeks GRI laporan keberlanjutannya. Sama halnya dengan GRI 202 tentang Keberadaan Pasar, HM Sampoerna tidak menjelaskan secara spesifik terkait pengungkapan 202-1 yang memuat rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional dan pengungkapan 202-2 yang memuat proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat. Perusahaan juga tidak mencantumkan GRI 202 dalam indeks GRI di laporan keberlanjutannya. Begitu juga dengan GRI 203 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang tidak ada dalam indeks GRI di laporan keberlanjutannya. Tidak ditemukan penjelasan mengenai dampak ekonomi tidak langsung baik untuk pengungkapan 203-1 terkait investasi infrastruktur dan dukungan layanan, maupun pengungkapan 203-2 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Dalam laporan keberlanjutannya HM Sampoerna menjelaskan dampak-dampak ekonomi secara langsung seperti kepada petani hingga UMKM sebagai distributor produknya.

GRI 206 terkait Perilaku Antipersaingan tidak terdapat pada indeks GRI laporan keberlanjutan HM Sampoerna begitu juga untuk GRI 207 tentang pajak tidak terdapat pada indeks GRI dalam laporan keberlanjutannya.

GRI 300

Dalam topik lingkungan (GRI 300), HM Sampoerna mengungkapkan **GRI 303** terkait Air dan Efluen. Dalam laporan keberlanjutannya HM Sampoerna menjelaskan pengungkapan 303-1 tentang interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. HM Sampoerna melakukan konservasi air di setiap fasilitas produksi dan mempertimbangkan pelestarian sumber air dengan melibatkan pemangku kepentingan. Perusahaan juga bertanggungjawab untuk memastikan semua air buangan dari fasilitas sudah sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya pada pengungkapan 303-2 terkait pengelolaan air buangan dan dampak terkait yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola air buangan agar sesuai dengan standar baku mutu air buangan yang relevan. Dalam hal ini perusahaan menetapkan standar pengelolaan air *Alliance for Water Stewardship* sejak 2018 dan tersertifikasi pada 2019 di Fasilitas Produksi Sukorejo. Kegiatan konservasi daerah tangkapan air juga mendukung masyarakat untuk mendapatkan air bersih secara berkelanjutan. Sampai tahun 2021, serifikasi standar *Alliance for Water Stewardship* juga didapatkan di Pabrik Karawang dan menargetkan semua lokasi pabrik akan memiliki sertifikasi AWS. Selain itu perusahaan juga melakukan tata kelola air di fasilitas produksi secara menyeluruh dan melakukan pengelolaan atas dampak air buangan dengan mengolah air limbah yang dihasilkan dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah sehingga air buangan memenuhi baku mutu lingkungan dan kualitas air buangan dipantau serta diuji secara periodik. Kemudian data dan kinerja pengelolaan air dan limbah juga dicantumkan dalam laporan keberlanjutannya.

Pengungkapan terkait topik lingkungan yang dilakukan oleh HM Sampoerna pada laporan keberlanjutannya terbatas pada pengelolaan air dan efluen saja. Tidak ada pembahasan mengenai material (GRI 301) dan energi (GRI 302) yang digunakan, keanekaragaman hayati (GRI 304), emisi (GRI 305), pembahasan lebih spesifik pada limbah (GRI 306) selain limbah cair, dan tidak ada pembahasan mengenai penilaian lingkungan pemasok (GRI 308).

GRI 400

Dalam topik sosial (GRI 400), HM Sampoerna mengungkapkan **GRI 401** terkait Kepegawaian. Perusahaan menjelaskan pengungkapan 401-2 tentang tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap atau paruh waktu. Pada laporan keberlanjutannya tidak ditemukan pembahasan spesifik terkait pengungkapan ini namun perusahaan menjelaskan bahwa besaran remunerasi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat jabatan dan kinerja yang bersangkutan serta memenuhi standar pengupahan yang berlaku sehingga perusahaan dapat memastikan besaran upah yang diterima karyawan setara dan adil berdasarkan penilaian yang objektif. Perusahaan juga memberikan kompensasi non finansial untuk meningkatkan jenjang karier, penghargaan atas prestasi tertentu, ataupun fasilitas sesuai ketentuan. Dalam GRI 401, perusahaan tidak memberikan pengungkapan 401-1 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan dan pengungkapan 401-3 terkait cuti melahirkan dalam laporan keberlanjutannya. Tidak ada penjelasan mengenai GRI 402 terkait Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen dalam indeks GRI laporan keberlanjutan.

Perusahaan mengungkapkan GRI 403 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam GRI 403, HM Sampoerna membuat pengungkapan 403-1 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam laporan keberlanjutannya dengan menjelaskan kondisi tempat kerja telah diatur dalam kode etik perusahaan dan prinsip serta praktik kesehatan, keselamatan, dan

pengamanan yang telah diatur oleh induk utama. Perusahaan juga memiliki komitmen atas kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat yang melindungi kesehatan fisik dan mental semua karyawan saat bekerja. Perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) yang diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 dan standar manajemen lingkungan ISO 14001. Di setiap tempat kerja juga terdapat Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan (P2K3).

Selanjutnya pada pengungkapan 403-2 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi kecelakaan, perusahaan melakukan pengungkapan ini dalam laporan keberlanjutannya dalam manajemen risiko K3. HM Sampoerna menjelaskan inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam manajemen risiko K3 diantaranya dengan mengembangkan *safety leading indicator* dalam pelaporan insiden dan bahaya kerja, sistem pengamatan perilaku, skenario keselamatan, program tanggap bahaya, dan *EHS Health Check*. Perusahaan juga mensosialisasikan informasi terbaru mengenai *EHS (environment, health and safety)* ke seluruh karyawan di fasilitas produksinya. Kontraktor yang bekerja di pabrik juga dipastikan keselamatan dan kesehatannya dalam lingkungan kerja melalui sistem manajemen keselamatan kontraktor.

HM Sampoerna juga mengungkapkan pengungkapan 403-3 terkait layanan kesehatan kerja. Perusahaan mendeskripsikan fungsi layanan kesehatan kerja yang disediakan dalam tempat kerjanya melalui program K3. Perusahaan juga menjelaskan bagaimana mereka memastikan kualitas layanan tersebut dengan menginspeksi dan mengobservasi layanan kesehatan dan keselamatan kerja juga menyelenggarakan seminar-seminar terkait topik kesehatan dan keselamatan kerja.

Selanjutnya pada pengungkapan 403-4 terkait partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja dalam perihal kesehatan dan keselamatan kerja juga dideskripsikan mengenai proses partisipasi dan konsultasi dengan pekerja dalam pengembangan, pengimplementasian, dan evaluasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan untuk menyediakan akses ke dan mengomunikasikan informasi yang relevan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja kepada pekerja. Hal ini dideskripsikan melalui kegiatan dan pelayanan-pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi pemeriksaan kesehatan dan layanan kesehatan di pabrik dengan penyediaan dokter dan klinik perusahaan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Perusahaan juga memiliki *Safety Committe* yang juga sebagai wadah konsultasi bagi karyawan dalam hal K3 yang terdapat 144 orang karyawan terlibat dalam Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) atau *Safety Committee* di seluruh lingkungan kerja. Namun tidak ada penjelasan mengenai frekuensi pertemuan dan otoritas pengambilan keputusan.

Pengungkapan 403-5 tentang pelatihan pekerja terkait kesehatan dan keselamatan kerja dijelaskan perusahaan melalui program K3 yang memberikan pelatihan bagi karyawan mencakup topik-topik kesehatan dan keselamatan kerja dan menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan karyawan pada Bulan K3 yang meliputi seminar-seminar kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dan edukasi interaktif bertema EHS.

Pengungkapan 403-6 tentang peningkatan kualitas kesehatan pekerja juga dijelaskan bersamaan dengan pengungkapan 403-3 sampai 403-5 melalui program K3 dengan mempromosikan

kebersihan, kebiasaan hidup sehat dengan olah raga dan makan makanan bergizi sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit pada masa pandemi saat itu.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengungkapan 403-7 terkait pencegahan dan mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait langsung dengan hubungan bisnis. Dalam mencegah penularan Covid-19 pada tahun 2021, perusahaan menerapkan standar keselamatan di semua fasilitasnya yang mencakup kewajiban untuk menggunakan alat pelindung diri (masker dan sanitasi tangan) dan pembatasan akses pada fasilitas produksi hanya untuk pekerja yang esensial. Perusahaan juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam mencegah penularan Covid-19.

Pada pengungkapan topik GRI 403, perusahaan tidak melakukan pengungkapan 403-8 terkait pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam indeks GRI nya. Perusahaan hanya menjelaskan terdapat 144 orang karyawan terlibat dalam Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) atau *Safety Committee* di seluruh lingkungan kerja.

Kemudian untuk pengungkapan 403-9 terkait keselamatan kerja dijelaskan perusahaan dengan deskripsi atas: 1) Tingkat Kehilangan Jam Kerja akibat Kecelakaan per 200.000 jam kerja untuk karyawan PMI, karyawan kontrak, dan kontraktor; 2) Total tingkat insiden tercatat per 200.000 jam kerja untuk karyawan PMI, karyawan kontrak, dan kontraktor; 3) Jumlah kematian akibat kerja untuk karyawan PMI, karyawan kontrak, dan kontraktor; 4) Tingkat frekuensi penyakit akibat kerja per 200.000 jam kerja untuk karyawan PMI dan karyawan kontrak; 5) Proporsi fasilitas manufaktur dengan sertifikasi ISO 45001 dan ISO 14001.

Selanjutnya perusahaan menggunakan GRI 404 tentang Pelatihan dan Pendidikan. Perusahaan membuat pengungkapan 404-2 mengenai program untuk pengelolaan keterampilan dan pembeajaran seumur hidup dengan mendeskripsikan: 1) Jumlah total *Eligible Employee*; 2) Total jam program pelatihan; 3) Evaluasi karyawan; 4) Persentase cakupan evaluasi untuk *EE*

Tidak ada penjelasan atas pengungkapan 404-1 tentang rata-rata jam program pelatihan per tahun dan pengungkapan 404-3 tentang persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier.

Lalu penjelasan mengenai GRI 413 mengenai Masyarakat Lokal, perusahaan melakukan pengungkapan 413-1 tentang pelibatan masyarakat lokal yang difokuskan pada UMKM dengan meningkatkan resiliensi UMKM dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan tantangan UMKM seperti keterampilan, akses permodalan, rantai pasokan, literasi digital, dan lain-lain yang dapat meningkatkan usahanya. Namun tidak terdapat penjelasan mengenai persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak sosial dan lingkungan serta program pengembangan. Perusahaan juga tidak menjelaskan pengungkapan 413-2 tentang operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat.

Tidak terdapat pembahasan terkait GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara, GRI 406: Nondiskriminasi, GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif, GRI 408 Pekerja Anak, GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok, GRI 415: Kebijakan Publik, GRI 416:

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan, dan GRI 418: Privasi Pelanggan dalam indeks GRI di laporan keberlanjutan HM Sampoerna.

Dapat disimpulkan dalam laporan keberlanjutan PT H.M. Sampoerna Tbk. lebih berfokus pada pengungkapan topik spesifik sosial (GRI 400) dan hanya membahas beberapa topik spesifik ekonomi (GRI 200) dan lingkungan (GRI 300). Walaupun perusahaan tidak melakukan pengungkapan terhadap seluruh topik spesifik GRI, perusahaan tetap melakukan pengungkapan terhadap topik-topik yang cukup penting dan sifat informasinya lebih umum.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Perusahaan di bidang perdagangan eceran dalam format minimarket atau waralaba yang didirikan pada 22 Februari 1989 kemudian *go public* pada 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AMRT. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menggunakan *GRI Standards* dalam mengungkapkan informasi dan dampak keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Topik spesifik yang dilaporkan mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI 200

Dalam penjelasan di topik spesifik ekonomi (GRI 200), Alfamart mengungkapkan GRI 201 terkait Kinerja Ekonomi yang mencakup pengungkapan 201-1 yang berisi tentang penjelasan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dalam laporan keberlanjutannya yang terintegrasi dengan laporan tahunan. Dalam laporannya, Alfamart memberikan gambaran atas nilai ekonomi yang diperoleh dan didistribusikan terkait pendapatan dan biaya-biaya yang memengaruhi nilai ekonomi mulai dari nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang disimpan atau ditahan. Selanjutnya pada pengungkapan 201-2 terkait implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim yang juga dijelaskan Alfamart dalam laporan keberlanjutannya, Alfamart tidak menghadapi risiko akibat perubahan iklim yang berimplikasi pada finansial perusahaan. Pengungkapan 201-3 terkait kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya. Alfamart menjelaskan dalam laporan keberlanjutannya terkait usia pensiun dini, masa persiapan pensiun karyawan naum tidak memberikan penjelasan tentang nilai perkiraan liabilitas, jika liabilitas program tersebut dipenuhi oleh sumber daya umum organisasi, persentase gaji yang dikontribusikan oleh karyawan atau pemberi kerja, dan tingkat partisipasi dalam program pensiun, seperti partisipasi dalam skema wajib atau sukarela, skema regional, atau berbasis negara, atau yang memiliki dampak finansial. Kemudian pada pengungkapan 201-4 terkait bantuan finansial yang diterima dari pemerintah, Alfamart beroperasi penuh tanpa menerima bantuan finansial dari pemerintah.

Alfamart juga mengungkapkan GRI 202 terkait Keberadaan Pasar pada pengungkapan 202-1 yang menjelaskan rasio standar upah karyawan *entry-level* berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional. Alfamart telah memenuhi ketentuan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gaji pokok yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan di level terendah minimal sama dan bahkan lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR). Perseroan tidak membedakan rasio gaji pokok untuk karyawan pria maupun wanita. Pada GRI 205 tentang Anti-korupsi, perusahaan menjelaskan pengungkapan 205-1 terkait operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi walaupun tidak ada penjelasan mengenai jumlah dan persentase total dari operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi. Perusahaan menjelaskan kejahatan keuangan sebagai salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh suatu perusahaan,

seperti tindakan korupsi, fraud, atau gratifikasi. Dalam penjelasan pengungkapan 205-2 tentang komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dengan sosialisasi mengenai gratifikasi terhadap seluruh karyawannya. Kemudian pengungkapan 205-3 yang berisi penjelasan insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Alfamart melaporkan tidak ada tindakan korupsi yang cukup signifikan. Namun demikian, Perseroan menemukan beberapa fraud yang terjadi di operasional gerai dan langsung ditindaklanjuti oleh tim investigasi hingga selesai. Jika karyawan diketahui melakukan tindakan korupsi atau fraud maka perusahaan akan memberikan tindakan tegas seperti diberi sanksi/teguran/ denda dan pemberhentian/pemecatan untuk meminimalkan terulang kembali tindakan fraud.

Alfamart tidak membahas GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung, GRI 204: Praktik Pengadaan, GRI 206: Perilaku Antipersaingan, GRI 207: Pajak dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2021.

GRI 300

Dalam topik spesifik lingkungan (GRI 300), Alfamart mengungkapkan GRI 302 terkait Energi. Alfamart membuat pengungkapan 302-1 yang menjelaskan terkait konsumsi energi dalam organisasi yang mencakup konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan, dalam joule atau kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. Alfamart juga memberikan penjelasan terkait jenis sumber energi yang digunakan dalam kegiatan operasinya. Pada pengungkapan 302-3 mengenai intensitas energi juga dijelaskan dalam laporan keberlanjutannya dan menyertakan data-data tahun sebelumnya sebagai pembanding. Dalam pengungkapan 302-4 alfamart menjelaskan upaya-upaya pengurangan konsumsi energi dengan menerapkan *Green Energy* untuk mendukung pencegahan Global Warming, salah satunya dengan implementasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Alfamart juga menjelaskan dampak operasional pada air di GRI 303 tentang air. Perusahaan memberikan penjelasan atas pengungkapan topik 303-3 tentang pengambilan air. Alfamart menjelaskan total pengambilan dari semua wilayah dalam megaliter, dan perincian jumlah total pengambilan air berdasarkan sumber-sumber pengambilan air seperti pada ketentuan GRI. Jumlah pengambilan air berdasarkan sumber di Alfamart dalam tiga tahun terakhir dengan memberikan data yang merepresentasikan penggunaan air di 32 cabang dan kantor pusat Alfamart. Kemudian Alfamart juga menjelaskan pengungkapan 303-5 terkait konsumsi air dalam perusahaan yang jumlahnya menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan penghematan air.

Dampak operasional perusahaan terkait emisi dijelaskan melalui GRI 305 yang membahas tentang emisi. Dalam GRI 305, Alfamart menjelaskan pengungkapan 305-2 terkait emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung dihasilkan melalui konsumsi listrik yang berasal dari jaringan PLN. Perusahaan menjelaskan juga total emisi yang dihasilkan oleh sumber energi yang digunakan. Kemudian Alfamart juga memberikan penjelasan atas pengungkapan 305-4 terkait intensitas emisi GRK yang dijelaskan dalam laporan keberlanjutannya dengan tabel data total emisi dan tidak ada rasio intensitas emisi GRK seperti pada ketentuan GRI.

Alfamart tidak mengungkapkan GRI 301: Material, GRI 304: Keanekaragaman Hayati, GRI 306: Efluen dan Limbah, GRI 306: Limbah, dan GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2021.

GRI 400

Dalam topik spesifik sosial (GRI 400), Alfamart mengungkapkan GRI 401 mengenai Ketenagakerjaan atau Kepegawaian dengan pengungkapan 401-1 yang menjelaskan mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Alfamart memberikan penjelasan atas jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru selama periode pelaporan berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya pada pengungkapan 401-2 terkait tunjangan yang diberikan pada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu dengan melaporkan tunjangan-tunjangan yang bersifat standar untuk karyawan purnawaktu organisasi tetapi tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu. Kemudian dalam pengungkapan 401-3 yang menjelaskan tentang cuti melahirkan, Alfamart menjelaskan sistematis cuti melahirkan kepada pegawai perempuan selama 90 hari kalender dan kepada suami yang mendampingi selama 2 hari. Terdapat data yang menjelaskan berapa jumlah pekerja yang mengambil cuti melahirkan dan jumlah pekerja yang kembali setelah mengambil cuti melahirkan dari tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan jenis kelamin.

Kemudian penjelasan terkait GRI 404 atas Pelatihan dan Pendidikan, Alfamart melaporkan pengungkapan 404-1 tentang rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan jenis kelamin dan kategori dari tahun ke tahun. Kemudian pengungkapan 404-2 mengenai program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan, Alfamart menjelaskan berbagai program pelatihan baik di dalam maupun di luar perusahaan yang telah direncanakan dan direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk in house training dan public training. Dalam pengungkapan 404-3 terkait persentase karyawan menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier di tahun 2021 dijelaskan Alfamart dengan persentase dan total karyawan baik yang menerima penilaian kerja maupun tidak menerima penilaian kerja berdasarkan jenis kelamin dan level jabatan.

Alfamart membuat pengungkapan atas GRI 405 terkait Keanekaragaman dan Kesempatan Setara. Dijelaskan dalam pengungkapan 405-1 yang membahas terkait keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan dengan persentase keanekaragaman berdasarkan kategori jenis kelamin, kelompok usia, dan indikator keberagaman lainnya yang relevan. Kemudian pengungkapan 405-2 terkait rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki, Alfamart menjelaskan bahwa perusahaan tidak membedakan rasio gaji pokok untuk karyawan pria maupun wanita.

Alfamart mengungkapkan GRI 406 yang menjelaskan topik Non-diskriminasi dengan pengungkapan 406-1 mengenai insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Alfamart menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Dengan lingkungan kerja yang mendukung karyawan dapat bekerja secara optimal. Sehingga pada tahun 2021 tidak ada pengaduan mengenai adanya diskriminasi di lingkungan kerja. Pada GRI 408 tentang Pekerja Anak, perusahaan memberikan penjelasan atas pengungkapan 408-1 tentang operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak dan pada GRI 409 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja pada pengungkapan 409-1 yang menjelaskan tentang operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja

paksa atau wajib kerja. Alfamart menjelaskan salah satu syarat umum pelamar adalah berusia minimal 18 tahun. Sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa tidak ada tenaga kerja anak di bawah umur dan pekerja paksa yang bekerja di perusahaan ini.

Mengenai Masyarakat Lokal dalam GRI 413, Alfamart memberikan penjelasan atas pengungkapan 413-1 terkait operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Alfamart menjelaskan pengelolaan dampak operasi terhadap masyarakat sekitar dan mengidentifikasi potensi dampak negatif diantaranya aspek lingkungan. Alfamart mengelola dampak negatif operasi dengan melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik, penggunaan air yang didaur ulang serta menggunakan listrik dengan tenaga surya. Alfamart menjelaskan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial di sekitar tempat operasional perusahaan dan memberdayakan UMKM melalui mitra UMKM Alfamart.

Terkait topik Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan dalam GRI 416, pengungkapan 416-1 atas penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa dan 416-2 atas insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa, Alfamart menjelaskan tanggung jawab produk dan prosedur-prosedur yang dilakukan untuk produk-produknya agar dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu dan mengeluarkan barang-barang yang tidak layak dijual. Pada tahun 2021 tidak ada laporan pengaduan dari konsumen terkait dampak dari produk terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan. Pada tahun 2021 terdapat satu produk yang ditarik dari seluruh gerai Alfamart karena adanya isu kualitas produk. Produk tersebut sudah memenuhi persyaratan pemerintah dan BPOM serta sudah sesuai dengan standar keamanan yang diterapkan di Indonesia, tetapi perusahaan supplier perlu melakukan pengecekan kualitas berkala terhadap produk sehingga meminta produk tersebut ditarik kembali. Pada pelabelan produk sistem pelabelan yang diterapkan oleh Alfamart telah mengedepankan transparansi untuk membangun kepercayaan para pelanggan. Untuk menjaga kualitas produk, Alfamart selalu memperhatikan dengan seksama tanggal kedaluwarsa produk. Selama tahun pelaporan, tidak ada insiden pelanggaran pelabelan dan informasi produk yang signifikan.

Dalam GRI 417 tentang Pemasaran dan Pelabelan pada pengungkapan 417-1 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa dan pengungkapan 417-2 tentang insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa, Alfamart memastikan bahwa produk yang dijual di seluruh gerai Alfamart memiliki label yang jelas dan benar sesuai dengan aturan pemerintah. Kriteria label yang diterapkan memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih dan bobot tuntas, nama dan alamat pihak yang memproduksi, keterangan halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, dan nomor izin beredar. Sistem pelabelan yang diterapkan oleh Alfamart telah mengedepankan transparansi untuk membangun kepercayaan para pelanggan. Untuk menjaga kualitas produk, Alfamart memperhatikan dengan seksama tanggal kedaluwarsa produk. Selama tahun pelaporan, tidak ada insiden pelanggaran pelabelan dan informasi produk yang signifikan. Dalam pengungkapan 417-3 tentang insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran dijelaskan Alfamart memperhatikan etika periklanan yang sesuai dengan tata krama (*code of conducts*) dan tata cara (*code of practices*) yang berlaku di Indonesia. Selama tahun 2021 tidak terdapat pengaduan atau pelanggaran terhadap etika promosi, iklan, sponsor, ataupun komunikasi pemasaran lainnya yang signifikan.

Alfamart tidak mengungkapkan GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen, GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, GRI 414 Penilaian Sosial Pemasok, GRI 415: Kebijakan Publik, dan GRI 418: Privasi Pelanggan dalam laporan keberlanjutannya pada tahun 2021.

Dalam laporan keberlanjutan Alfamart tahun 2021, perusahaan mengungkapkan cukup banyak topik spesifik pada dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam laporannya, alfamart lebih berfokus dalam penyampaian pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, lingkungan, dan sosial yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Alfamart lebih banyak mengungkapkan topik-topik yang relevan dengan kegiatan usahanya.

PT Unilever Indonesia Tbk.

Unilever merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya meliputi produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi seperti sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. yang didirikan pada 5 Desember 1933 kemudian *go public* pada 11 Januari 1982 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. PT Unilever Indonesia Tbk. menggunakan *GRI Standards* untuk mengungkapkan informasi dan dampak keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Topik spesifik yang dilaporkan mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI 200

Pada topik spesifik ekonomi (GRI 200), Unilever melaporkan GRI 201 yang membahas Kinerja Ekonomi khususnya dengan pengungkapan 201-1 yang membahas tentang nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dalam laporan keberlanjutannya yang dibuat terpisah dengan laporan tahunannya. Kemudian dalam topik spesifik ekonomi, Unilever juga melaporkan GRI 202 tentang Keberadaan Pasar pada pengungkapan 202-1 yang menjelaskan rasio standar upah karyawan *entry level* berdasarkan jenis kelamin terhadap Upah Minimum Regional namun hanya memberikan rincian biaya pegawai dan tidak menyertakan penjelasan atas rasio standar upah karyawan. Selanjutnya pembahasan mengenai Dampak Ekonomi Tidak Langsung dalam GRI 203 dan menjelaskan pengungkapan 203-2 yang menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dalam indeks GRI laporan keberlanjutannya namun dalam penjelasannya tidak terdapat pengungkapan sesuai dengan pengungkapan 203-2. Selanjutnya pada GRI 205 tentang Antikorupsi di pengungkapan 205-2 yang mengungkapkan komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dalam prosedur anti-korupsi namun hanya ada pada indeks GRI dan tidak terdapat penjelasan terkait dalam laporan keberlanjutan melainkan ditemukan pengungkapan 205-3 terkait insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil perusahaan. Unilever melaporkan tidak ada kasus korupsi yang telah terbukti melibatkan karyawan dan mitra kerjanya selama tahun 2021.

Dalam laporan keberlanjutannya, Unilever tidak mengungkapkan GRI 204: Praktik Pengadaan, GRI 206: Perilaku Antipersaingan, dan GRI 207: Pajak.

GRI 300

Dalam topik spesifik lingkungan (GRI 300), Unilever melaporkan pembahasan dampak lingkungan pada GRI 302 yang menjelaskan tentang Energi pada pengungkapan 302-1 terkait

konsumsi energi dalam organisasi dengan memberikan data konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan dan sumber daya terbarukan dalam organisasi. Dalam pengungkapan 302-3 tentang intensitas energi, Unilever melaporkan data intensitas penggunaan energi dari tahun ke tahun. Kemudian dalam GRI 303 yang menjelaskan tentang Air dan Efluen, Unilever memberikan penjelasan atas pengungkapan 303-3 terkait pengambilan air, namun tidak ada penjelasan terkait pengungkapan ini setelah ditelusuri dari indeks GRI ke laporan keberlanjutannya.

Selanjutnya pembahasan atas GRI 305 yaitu Emisi yang dijelaskan dalam pengungkapan 305-1 yang menjelaskan emisi GRK langsung (Cakupan 1), pengungkapan 305-2 atas emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung, dan pengungkapan 305-3 terkait emisi energi GRK (Cakupan3) tidak langsung lainnya dengan data yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutannya dengan data-data dari tahun sebelumnya sebagai pembanding jumlah emisi yang dikeluarkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pengungkapan 305-4 terkait intensitas emisi GRK hanya terdapat dalam indeks namun tidak terdapat pembahasan mengenai pengungkapan ini dalam laporan keberlanjutannya.

Terkait Limbah dalam GRI 306, Unilever memberikan penjelasan mengenai pengungkapan 306-1 yang membahas timbulan limbah dan dampak-dampak yang signifikan terkait limbah, pengungkapan 306-2 yang membahas pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah, pengungkapan 306-3 terkait timbulan limbah, dan pengungkapan 306-4 yang membahas terkait limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir dengan data timbulan limbah dan sampah berdasarkan kategorinya, komitmen mengatasi permasalahan plastik dari hulu ke hilir yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutannya, dan komitmen dalam pengelolaan limbah sehingga sampah plastik yang dihasilkan dapat digunakan atau diolah kembali untuk digunakan kembali. Dalam pengungkapan 306-5 terkait limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir melalui data limbah yang dibuang dari tahun ke tahun.

Dalam topik spesifik lingkungan, Unilever tidak mengungkapkan GRI 301: Material, GRI 304: Keanekaragaman Hayati, GRI 306: Efluen dan Limbah, dan GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2021.

GRI 400

Dalam topik sosial (GRI 400), Unilever mengungkapkan GRI 401 yang menjelaskan tentang Kepegawaian pada pengungkapan 401-1 yang membahas perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan dan perputaran karyawan berdasarkan kategori area, kelompok umur, dan jenis kelamin dalam laporan keberlanjutannya. Unilever juga mengungkapkan GRI 403 yang menjelaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengungkapan 403-1 yang menjelaskan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang telah diterapkan di Unilever yang juga memiliki Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) dan menjelaskan 100% karyawan dan pekerja (perusahaan dan kontraktor) telah menerapkan dalam SMK3, dan telah diaudit secara internal. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan sertifikasi SMK3 setiap tiga tahun sekali. Kemudian dalam pengungkapan 403-2 terkait identifikasi bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden dijelaskan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi beberapa potensi risiko bahaya terkait pekerjaan. Seperti bahaya ergonomis, kecelakaan di jalan, tersengat listrik, kecelakaan akibat peralatan mesin dan alat angkut, bekerja di ketinggian, hingga bahan kimia. Perusahaan juga menjelaskan bagaimana proses identifikasi bahaya, proses pekerja melaporkan

bahaya terkait pekerjaan, dan proses yang digunakan untuk menginvestigasi insiden terkait pekerjaan. Dalam pengungkapan 403-3 terkait layanan kesehatan kerja, Unilever memiliki departemen MOH (*Medical Occupational Health*) yang dipimpin seorang dokter dan dokter perusahaan yang ditempatkan di pabrik bersertifikat HIPERKES. Dijelaskan juga fungsi-fungsi dari layanan kesehatan yang disediakan perusahaan. Lalu terkait pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengungkapan 403-5 dijelaskan unilever dalam program keselamatan kerja yang menjelaskan prosedur-prosedur operasi keselamatan kerja dan Unilever telah melakukan 22 sesi latihan selama 2021 dengan 435 peserta. Upaya peningkatan kualitas kesehatan kerja dalam pengungkapan 403-6 juga diungkapkan sesuai GRI dengan menjelaskan program kesehatan kerja yang dilakukan untuk memotivasi karyawan agar menjadi lebih sehat untuk meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya dalam pengungkapan 403-8 Unilever mengungkapkan pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup kontraktor dalam bekerja di lingkungan Unilever. Seluruh karyawan dan pekerja (perusahaan dan kontraktor) yang telah menerapkan dalam SMK3, dan telah diaudit secara internal. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh badan sertifikasi SMK3 setiap tiga tahun sekali. Selama 2021, Unilever melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi dalam perusahaan untuk seluruh karyawan, pekerja yang bukan karyawan namun pekerjaannya dikendalikan oleh Unilever. Unilever menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja.

Terkait Pelatihan dan Pendidikan pada GRI 404 dalam pengungkapan 404-1 terkait rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan, Unilever mengungkapkan data pelatihan dan pengembangan yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, jenis pelatihan dan posisi karyawan. Selanjutnya pada pengungkapan 404-2 yang menjelaskan program-program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Perusahaan mengadakan *Unilever Business Academy* untuk memberikan pelatihan dan praktik terbaik dan relevan, serta dapat diaplikasikan sehingga memungkinkan Unilever Indonesia dapat berkembang “*from good to great*”. Program ini dapat memfasilitasi dan meningkatkan kinerja karyawan.

Dalam GRI 405 yang membahas Keanekaragaman dan Kesempatan yang Setara, Unilever memberikan penjelasan batas pengungkapan 405-1 yang membahas terkait keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan dengan memberikan data persentase individu di dalam badan tata kelola dan karyawan organisasi di kategori jenis kelamin, kelompok usia, dan indikator keberagaman lainnya seperti posisi jabatan, status kepegawaian, dan pendidikan. Kemudian dalam pengungkapan 405-2 terkait rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki, Unilever menjelaskan perusahaan memastikan tidak membedakan pemberian upah dan remunerasi berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya dalam pembahasan GRI 406 Non-diskriminasi, dalam pengungkapan 406-1 terkait insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Unilever menjelaskan tidak ada insiden diskriminasi atau kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Perusahaan memiliki peraturan RDFT yang kuat untuk melindungi karyawan, terutama perempuan dari intimidasi dan pelecehan di lingkungan kerja.

Terkait pembahasan Pekerja Anak dan Kerja Paksa dalam GRI 408 dan GRI 409 dalam pengungkapan 408-1 dan 409-1 tentang operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak, pekerja kerja paksa atau wajib kerja, Unilever berkomitmen untuk tidak memperkerjakan anak di bawah umur di seluruh rantai pasoknya sebagaimana tercantum dalam *Responsible Business Policy (RBP)* dan tidak menerapkan kerja paksa/wajib kerja dengan

memberikan kebebasan berpendapat dan berserikat kepada seluruh karyawan termasuk hak untuk menolak pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

Pembahasan mengenai GRI 412 atas Penilaian Hak Asasi Manusia diungkapkan perusahaan dalam pengungkapan 412-1 terkait operasi-operasi yang telah melewati tinjauan Hak Asasi Manusia atau penilaian dampak dan pengungkapan 412-3 terkait perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul Hak Asasi Manusia atau yang telah melalui penyaringan Hak Asasi Manusia. Namun GRI 412 telah dimasukkan ke dalam draf pengungkapan GRI 103 dan 103 di tahun 2020. Dalam GRI 413 yang membahas Masyarakat Lokal dengan pengungkapan 413-1 yang menjelaskan operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan. Unilever Indonesia berupaya mendorong para ibu untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui program Bu Karsa. Program ini bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengedukasi para Ibu di Indonesia mengenai PHBS, makanan bergizi dan bernutrisi, pengelolaan sampah di rumah tangga, serta kesejahteraan. Program ini telah menjangkau 500.000 Ibu dan keluarga di lima Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak terdapat penilaian dampak sosial, termasuk penilaian dampak gender, berdasarkan proses partisipatif, penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus-menerus dan ketentuan pengungkapan lainnya, hanya ada penjelasan atas program pengembangan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

Penilaian Sosial Pemasok (GRI 414) diungkapkan Unilever dengan pengungkapan 414-1 yang menjelaskan bagaimana seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial dijelaskan dalam laporan keberlanjutannya bahwa Unilever mensyaratkan para pemasoknya untuk bertanggung jawab dalam kriteria sosial namun tidak ada data persentase pemasok baru yang diseleksi menggunakan kriteria sosial. Dalam GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan, Unilever memberikan penjelasan atas pengungkapan 417-1 tentang persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa dan 417-2 atas insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. Unilever dalam penjelasan tanggung jawab produknya menjelaskan informasi label dengan berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang lengkap pada kemasan dengan bertanggung jawab terhadap setiap pelabelan dan atas pemberian informasi yang telah diberikan. Termasuk mengenai informasi semua label produk yang ada di dalam produk dengan tepat, termasuk kandungan bahan baku, penggunaan, keamanan, tanggal kedaluwarsa, kepatuhan terhadap peraturan, dan tidak menyesatkan. Pada tahun pelaporan tidak ada kasus yang diakibatkan oleh kesalahan prosedur dalam informasi produk atau pelabelan. Terkait Privasi Pelanggan dalam GRI 418 pada pengungkapan 418-1 tentang pengaduan yang berdasar mengenai pelanggan terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan dijelaskan selama tahun 2021, tidak ada pengaduan terkait penyalahgunaan data pelanggan. Perusahaan menerapkan kebijakan yang sangat ketat terhadap privasi dan perlindungan data pelanggan dan tidak pernah menggunakan data pelanggan untuk kepentingan lain di luar semestinya.

Dalam GRI 400, Unilever tidak mengungkapkan GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen, GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, GRI 415: Kebijakan Publik, dan GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan dalam laporan keberlanjutannya di tahun 2021.

Dalam laporan keberlanjutannya Unilever lebih berfokus dalam pembahasan yang berhubungan dengan lingkungan khususnya pengelolaan limbah, tenaga kerja, dan konsumennya. Unilever tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi dan lingkungan khususnya penggunaan energi. Pembahasan dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutannya relevan dengan kegiatan usaha Unilever.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Garudafood merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian yang didirikan pada 24 Agustus 1994 kemudian *go public* pada 10 Oktober 2018 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GOOD. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk mengacu pada Standar *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan *GRI Standards: Pilihan Inti (Core)* untuk mengungkapkan informasi dan dampak keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Topik spesifik yang dilaporkan mencakup ekonomi, lingkungan, dan sosial.

GRI 200

Dalam topik spesifik ekonomi (GRI 200) Garudafood menjelaskan Kinerja Ekonomi dalam GRI 201 dan menjelaskan pengungkapan 201-1 terkait nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan dalam penjelasan kinerja ekonominya. Selanjutnya terkait Keberadaan Pasar dalam GRI 202 dalam pengungkapan 202-1 terkait rasio standar upah *entry level* berdasarkan gender dibandingkan upah minimum regional namun dalam laporan keberlanjutannya, Garudafood menuliskan pengungkapan ini pada pengungkapan 202-2. Peneliti juga tidak menemukan penjelasan rasio upah dalam laporan keberlanjutannya, hanya ada penjelasan data upah karyawan tingkat terendah masih sesuai dengan ketentuan upah minimum regional. Kemudian dalam GRI 203 atas Dampak Ekonomi Tidak Langsung dalam pengungkapan 203-2 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, Garudafood memberikan dampak ekonomi tidak langsung dalam mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara berkesinambungan melalui pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan syarat dan kriteria penerimaan karyawan.

Terkait Praktik Pengadaan GRI 204 Garudafood memberikan penjelasan atas pengungkapan 204-1 yang membahas proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, Garudafood memberikan penjelasan mengenai proporsi dan kontrak dari pemasok lokal. Lalu pada GRI 205 yang membahas Antikorupsi dengan pengungkapan 205-2 dan 205-3 yang membahas komunikasi dan pelatihan antikorupsi serta insiden korupsi dan tindak lanjut yang diambil perusahaan. Perusahaan melakukan sosialisasi terkait fraud, antisuap dan antikorupsi, Di tahun 2021 laporan yang diterima terkait fraud, antisuap dan antikorupsi ada sebanyak sebanyak 3 laporan dan 100% sudah ditindaklanjuti.

Tidak terdapat pengungkapan atas GRI 206: Perilaku Antipersaingan dan GRI 207: Pajak dalam laporan keberlanjutan yang terintegrasi dalam laporan tahunan Garudafood.

GRI 300

Atas dampak lingkungan yang dihasilkan oleh Garudafood, perusahaan mengungkapkan topik spesifik lingkungan (GRI 300) yang membahas tentang Material dalam GRI 301. Dalam GRI 301, perusahaan memberikan penjelasan atas pengungkapan 301-2 terkait bahan material yang

digunakan kembali. Garudafood menjelaskan di tahun 2021 mereka menginisiasi penggunaan kemasan ramah lingkungan dengan melakukan pengurangan layer pada kemasan produk. Pengurangan layer pada kemasan produk merupakan salah satu bentuk komitmen Garudafood dalam mengurangi sampah plastik dan menjadikan produk mereka sebagai produk yang ramah lingkungan. Pengungkapan 301-3 terkait produk yang ditarik kembali terdapat dalam indeks GRI laporan keberlanjutan Garudafood dan hingga Desember 2021 terdapat penarikan produk sebanyak 12.624 karton. Tindakan penarikan produk ini diambil untuk memastikan semua produk makanan dan minuman yang kualitasnya tidak sesuai tidak sampai ke tangan konsumen. Penarikan dilakukan sampai level toko/outlet.

Pada penjelasan Energi di GRI 302, terdapat pengungkapan 302-1 terkait konsumsi energi organisasi, pengungkapan 302-3 terkait intensitas energi, dan pengungkapan 302-4 terkait pengurangan konsumsi energi. Ketiga pengungkapan ini dibahas perusahaan dengan menjelaskan berapa banyak konsumsi energi, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi, dan intensitas energi dengan menyertakan data konsumsi dan pengurangan energi dari tahun ke tahun. Dan terkait Air dalam GRI 303, perusahaan membahas pengungkapan 303-2 terkait pengelolaan dampak terkait debit air, pengungkapan 303-3 terkait pengambilan air, dan pengungkapan 303-5 terkait konsumsi air. Perusahaan memberikan penjelasan pemakaian air yang diambil dari air tanah. Untuk mengelola dampak terkait debit air, perusahaan berupaya untuk menghemat penggunaan air.

Keanekaragaman Hayati dalam GRI 304 diungkapkan perusahaan dalam pengungkapan 304-3 yang membahas habitat yang dilindungi pada indeks GRI tidak dapat ditemukan penjelasannya di laporan keberlanjutan namun terdapat penjelasan atas pengungkapan 304-1 lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung yang mana dalam hal ini adalah area operasional yang dekat dengan kawasan yang dilindungi adalah Pabrik Garudafood unit Rancaekek-Gunung Geulis, Jawa Barat yang dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK No. 633/MenHLK/Setjen/PLA.4/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebagai Hutan Pendidikan seluas 338,31 Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pengungkapan 304-2 dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati dalam hal ini Garudafood melakukan penghijauan sebagai upaya menjaga keanekaragaman hayati di dekat kawasan hutan lindung Gunung Geulis.

Pembahasan terkait pengungkapan Emisi dalam GRI 305 disampaikan perusahaan dengan membuat pengungkapan 305-1 terkait emisi yang dihasilkan perusahaan (cakupan 1), pengungkapan 305-2 terkait emisi dari energi tidak langsung (cakupan 2), dan pengungkapan 305-5 terkait reduksi emisi GRK dalam laporan keberlanjutannya pada pembahasan atas pengurangan emisi. Kemudian pada GRI 306 terkait Limbah, perusahaan juga memberikan pengungkapan 306-2 atas pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan *GRI Standards*.

Dalam topik lingkungan, Garudafood tidak melakukan pengungkapan atas GRI 306: Efluen dan Limbah dan GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok dalam laporan keberlanjutan dan indeks GRI nya. Beberapa pengungkapan juga belum sesuai dengan standar yang ada namun tetap menjelaskan topik terkait.

GRI 400

Atas dampak sosial yang dihasilkan perusahaan, perusahaan membahas pengungkapan topik sosial (GRI 400) dimulai dengan GRI 401 tentang kepegawaian dengan pengungkapan 401-1 yang membahas tentang perekrutan karyawan baru dan perputaran karyawan dengan data jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan selama 2021 namun tidak disajikan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah seperti dalam ketentuan GRI. Kemudian pengungkapan 401-2 terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu, perusahaan memberikan fasilitas dan benefit bagi karyawan yang jenis dan besarnya disesuaikan dengan jenjang jabatan karyawan. Kemudian terkait cuti melahirkan dalam pengungkapan 401-3 perusahaan memberikan cuti kepada karyawan berupa cuti tahunan, cuti melahirkan kepada karyawan wanita dengan ketentuan 1,5 bulan sebelum hari perkiraan lahir dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dan cuti ayah kepada karyawan laki-laki untuk mendampingi istri melahirkan dengan ketentuan 2 hari. Selama tahun 2021, karyawan yang mengajukan cuti melahirkan dan cuti ayah sebanyak 250 orang yang terdiri dari karyawan wanita sebanyak 87 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 163 orang dan 235 menyatakan kembali bekerja ke perusahaan setelah masa cuti berakhir.

Pembahasan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam GRI 403 diungkapkan perusahaan dengan memberikan penjelasan atas pengungkapan 403-3 layanan kesehatan kerja, pengungkapan 403-6 tentang peningkatan kualitas kesehatan karyawan, dan pengungkapan 403-8 tentang karyawan yang diberikan perlindungan oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak dijelaskan spesifik dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Garudafood hanya menjelaskan upaya-upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan perusahaan.

Terkait Pelatihan dan Pendidikan pada GRI 404, Garudafood mengungkapkan pengungkapan 404-1 yang membahas rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan dan pengungkapan 404-2 program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan dalam laporan keberlanjutannya dalam pembahasan program pelatihan yang menjelaskan selama tahun 2021 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan ada sebanyak 6064 karyawan dengan rata-rata jam pelatihan adalah 5,11 per karyawan. Program pelatihan yang diikuti meliputi pelatihan leadership development program, program pengembangan yang menasar *generic* dan *technical competency*. Selain itu program yang berkaitan dengan pengayaan dan internalisasi nilai-nilai *corporate culture*. Pengungkapan 404-3 persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier yang dicantumkan dalam indeks GRI tidak dapat ditemukan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Dalam tema Keberagaman di GRI 405, perusahaan mencantumkan pengungkapan 405-1 tentang komposisi karyawan menurut level jabatan dan gender dan pengungkapan 405-2 terkait perbandingan rasio upah antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam indeks GRI laporan keberlanjutannya dan melaporkan data komposisi karyawan dalam pembahasan kesetaraan kesempatan kerja. Tidak ada penjelasan terkait rasio upah karyawan laki-laki dan perempuan. Pada pembahasan GRI 407 terkait Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama, Garudafood memberikan penjelasan atas pengungkapan 407-1 tentang operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama mungkin berisiko. Garudafood memberikan izin terbentuknya serikat pekerja karyawan. Jumlah karyawan yang terdaftar

dalam serikat pekerja hingga saat ini adalah sebanyak 3.860 orang karyawan di mana terbagi ke dalam 6 (enam) organisasi serikat pekerja di lingkungan Perusahaan.

Dalam topik (GRI 408) Pekerja Anak dan (GRI 409) Pekerja Paksa atau Wajib Kerja, perusahaan memberikan penjelasan atas pengungkapan 408-1 dan 409-1 tentang operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak, kerja paksa atau wajib kerja dalam hal ini perusahaan memiliki aturan mengenai umur yang dapat diterima sebagai karyawan dan aturan jam kerja karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan periode 2021 - 2023. Perseroan tidak mempekerjakan pekerja anak, dan tidak menggunakan sistem kerja paksa. Kemudian dampak terhadap Masyarakat Setempat (GRI 413) oleh kegiatan usaha perusahaan dibahas melalui pengungkapan 413-1 tentang operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan Program Pengembangan Komunitas. Garudafood membantu mengembangkan komunitas lokal dengan beberapa Program Pengembangan Komunitas di antaranya adalah program Kampung Wirausaha dan program Kampung Hidroponik.

Sebagai perusahaan yang memperhatikan produknya dan konsumennya, Garudafood membahas GRI 416 tentang Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan pada pengungkapan 416-1 yang menjelaskan penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari Produk dan layanan dengan melakukan evaluasi terhadap kualitas bahan baku, bahan kemas yang digunakan serta produk akhir yang dihasilkan. Dijelaskan juga hingga tahun 2021 produk yang dihasilkan telah 100% memenuhi standar keamanan dan regulasi yang relevan dan telah melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat sehingga terjamin kualitas dan keamanannya. Selanjutnya terdapat pembahasan GRI 417 terkait Pemasaran dan Pelabelan dalam pengungkapan 417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Pengungkapan ini tidak terdapat dalam indeks GRI perusahaan namun dijelaskan dalam laporan keberlanjutannya. Perusahaan memberikan penilaian pada semua produk yang didistribusikan dan dijual kepada pelanggan dengan mencantumkan informasi produk melalui label yang ditempel di produk secara jelas dan akurat, mulai dari komposisi, nilai informasi gizi, tanggal kadaluarsa, logo halal dan SNI, izin edar, lokasi produksi hingga layanan konsumen. Selama tahun 2021 tidak ada insiden ketidakpatuhan mengenai informasi dan pelabelan produk dan layanan. Pengungkapan terakhir yang dilakukan perusahaan adalah GRI 418 terkait Kerahasiaan Pelanggan pada pengungkapan 418-1 yang mengungkapkan jumlah laporan keluhan nasabah/pelanggan berkaitan dengan terbukanya kerahasiaan pelanggan dan hilangnya data nasabah/ pelanggan. GRI 418 dicantumkan dalam indeks GRI namun pengungkapan ini tidak ditemukan dalam pembahasan laporan keberlanjutan perusahaan.

Tidak terdapat pengungkapan atas GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen, GRI 406: Nondiskriminasi, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok, GRI 415: Kebijakan Publik, dan GRI 418: Privasi Pelanggan dalam penjelasan maupun indeks GRI Garudafood di laporan keberlanjutannya tahun 2021.

Dari pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan masih banyak yang belum sesuai dengan *GRI Standards* namun perusahaan masih dapat membahas topik spesifik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tidak adanya keterangan halaman dalam indeks GRI laporan keberlanjutannya juga menjadi salah satu keterbatasan peneliti dalam mengolah data.

PT Eagle High Plantations Tbk.

PT Eagle High Plantations Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, dan pengolahan hasil perkebunan dengan produk minyak sawit mentah dan inti sawit. Perusahaan ini didirikan sejak 6 November 2000 kemudian *go public* pada 27 Oktober 2009 di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BWPT. Laporan Keberlanjutan 2021 adalah laporan kelima PT Eagle High Plantations Tbk yang menyajikan informasi kinerja keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) untuk periode 1 Januari hingga 30 Desember 2021. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, Standar *Global Reporting Initiative* (GRI): Opsi Inti, dan 10 prinsip *United Nation Global Compact* (UNGC).

GRI 200

Pada topik spesifik ekonomi (GRI 200), perusahaan menjelaskan kinerja ekonomi dalam GRI 201 di pengungkapan 201-1 yang membahas nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan pada tahun 2021, perusahaan juga menjelaskan kenaikan pendapatan di tahun 2021 dan membuat pengungkapan sesuai dengan *GRI Standards*. Selanjutnya perusahaan membuat pengungkapan 201-2 yang membahas implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim. Perusahaan menghadapi perubahan iklim yang dapat memengaruhi dan menurunkan kinerja produksi. Perusahaan menjelaskan strategi-strategi mitigasi risiko perubahan iklim dalam pembahasannya di laporannya. Selanjutnya terdapat pembahasan atas pengungkapan 201-3 yang membahas kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya dan pengungkapan 201-4 yang mengungkapkan bantuan finansial yang diterima dari pemerintah. Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan mengikutsertakan karyawan pada program pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan dan berkontribusi dalam membayar iuran kepesertaan karyawan. Di tahun 2021 perusahaan kembali mendapatkan keringanan tarif pajak penghasilan dari Peraturan Pemerintah No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dengan memberikan insentif berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Dalam laporan keberlanjutannya, EHP tidak mengungkapkan topik spesifik ekonomi lainnya seperti GRI 202: Keberadaan Pasar, GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung, GRI 204: Praktik Pengadaan, GRI 205: Antikorupsi, GRI 206: Perilaku Antipersaingan, dan GRI 207: Pajak.

GRI 300

Terkait topik lingkungan (GRI 300), perusahaan menjelaskan dampak-dampak lingkungan dari kegiatan usahanya mulai dari pengungkapan 302-1 tentang konsumsi energi dalam organisasi pada GRI 302. Perusahaan menjelaskan volume penggunaan energi berdasarkan sumbernya dan lokasi operasinya. Kemudian dalam penggunaan dan pengelolaan air dan efluen pada GRI 303 perusahaan membahas pengungkapan 303-1 terkait pengambilan air berdasarkan sumber, 303-2 terkait manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air, 303-4 terkait pembuangan air, dan 303-5 terkait konsumsi air. Perusahaan menjelaskan pengungkapan-pengungkapan ini melalui penjelasan terkait konsumsi air, pengelolaan air, limbah, dan efluen, data jumlah pemakaian air berdasarkan sumber dan anak perusahaannya, data jumlah pelepasan

olahan air bekas pakai proses produksi, dan data hasil pengukuran kualitas air yang dilepaskan untuk aplikasi lahan.

Dalam GRI 304 tentang Keanekaragaman Hayati, perusahaan mengungkapkan oengungkapan 304-1 yang membahas tentang lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung dalam hal ini Terdapat 12,77% area yang dilindungi dalam lokasi operasi EHP. Identifikasi area yang dilindungi dilakukan EHP dengan pemetaan lokasi operasi menggunakan kajian penelitian nilai konservasi tinggi (NKT)/ *high conservation value* (HCV). Selanjutnya dalam pengungkapan 304-2 dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati menjelaskan risiko hama dan mengupayakan pengendalian hama dengan metode alamiah. Lalu untuk pengungkapan 304-3 terkait habitat yang dilindungi atau direstorasi dengan mengungkapkan ukuran dan lokasi dari seluruh habitat kawasan yang dilindungi atau yang direstorasi dengan metode *Spatial Monitoring and Reporting Tools* (SMART). Perusahaan tidak melakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau merestorasi wilayah habitat yang berbeda dengan wilayah di mana organisasi telah melakukan pengawasan dan mengimplementasikan restorasi atau langkah-langkah perlindungan. Pengungkapan 304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi diungkapkan perusahaan dengan fokus pada perlindungan dan rehabilitasi spesies orangan.

Pada pengungkapan terkait emisi yang dihasilkan perusahaan dalam GRI 305, perusahaan membahas pengungkapan 305-1 tentang emisi GRK (Cakupan 1) langsung dan 305-2 tentang upaya pengurangan emisi GRK. EHP mengungkapkan data sumber emisi berdasarkan kegiatan usaha dan perusahaan, kemudian data hasil pengukuran emisi langsung (cakupan 1), dan memberikan penjelasan terkait upaya pengurangan emisi GRK dengan cara melakukan perhitungan emisi Cakupan 1 yang berasal dari pengelolaan lahan, pemupukan, konsumsi energi pada pabrik, limbah cair dari pengolahan minyak sawit, dan transportasi. Perhitungan emisi dilakukan Perseroan menggunakan kalkulator ISPO yang diadaptasi dari kalkulator IPCC. Kemudian pengungkapan terkait limbah pada GRI 306 diungkapkan melalui pengungkapan 306-2 yang membahas mengenai pengelolaan dampak signifikan terkait limbah yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal ini EHP mengelola limbah berupa tandan buah kosong dan jangkos dengan memanfaatkannya menjadi pupuk organik/pupuk pokok sawit. Untuk limbah berupa serat dan cangkang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler yang digunakan untuk mesin pembangkit listrik dan penunjang proses pemanasan. EHP juga memanfaatkan limbah untuk pembangkit listrik tenaga biogas dan mengungkapkan data volume limbah dan pemanfaatannya.

Tidak terdapat pengungkapan GRI 301: Material, GRI 306: Efluen dan Limbah, dan GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok dalam indeks GRI laporan keberlanjutan EHP. Topik-topik lingkungan yang diungkapkan cukup relevan dengan kegiatan usaha perusahaan.

GRI 400

Terkait dampak sosial (GRI 400) yang dihasilkan oleh perusahaan, EHP mengungkapkan sistem keselamatan kerja yang berlaku dalam perusahaan ini pada GRI 403 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan membahas pengungkapan 403-1 terkait sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, pengungkapan 403-2 identifikasi bahaya dan pengelolaan K3,

403-8 Jumlah pekerja yang dicakup oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, 403-9 Cedera terkait pekerjaan, dan 403-10 Kesehatan kerja. Dalam pembahasan di laporan keberlanjutan, EHP menerapkan praktik-praktik terbaik keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan mengidentifikasi risiko yang termasuk ke dalam pekerjaan risiko tinggi seperti terjatuh, cedera, atau paparan zat kimia. EHP membentuk Komite Bersama K3, yaitu komite resmi gabungan manajemen dan karyawan terkait K3 yang berfungsi sebagai forum komunikasi resmi antara manajemen dan pekerja, selain melalui LKS bipartit. Di tahun 2021, terdapat rata-rata 5-10% jumlah perwakilan manajemen K3. Perusahaan memberikan penjelasan tentang cara identifikasi bahaya, dan jumlah dan tingkat kecelakaan kerja.

Dalam kegiatan operasional EHP melibatkan masyarakat lokal seperti dalam GRI 413, perusahaan membahas pengungkapan 413-1 terkait operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. EHP mengungkapkan persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan program pengembangan masyarakat berhubungan dengan kegiatan usahanya.

Dalam topik sosial, EHP tidak mengungkapkan GRI 401: Kepegawaian, GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen, GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan, GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara, GRI 406: Nondiskriminasi, GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif, GRI 408: Pekerja anak, GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok, GRI 415: Kebijakan Publik, GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan, dan GRI 418: Privasi Pelanggan dalam laporan keberlanjutannya. Namun pembahasan-pembahasan terkait dampak sosial lainnya dijelaskan juga dalam pedoman penyusunan yang lain seperti (POJK) No. 51/POJK.03/2017.

EHP hanya mengungkapkan beberapa pengungkapan GRI namun pengungkapan yang dilaporkan cukup sesuai dengan pedoman penyusunan pengungkapan GRI dan cukup lengkap dalam membahas topik-topik spesifik. EHP lebih berfokus pada pengungkapan topik lingkungan mengingat kegiatan usahanya di bidang perkebunan yang berhubungan langsung dengan lingkungan. EHP juga cukup fokus dalam pengembangan masyarakat setempat dan praktik keselamatan kerja dalam perusahaannya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan publik dalam sektor barang konsumen primer di papan pencatatan utama dengan jumlah saham beredar di atas 30.000.000.000 lembar yang memiliki laporan keberlanjutan menggunakan *GRI Standards* sebagai panduan dalam penyusunan laporan keberlanjutannya. Dalam sampel yang digunakan, tidak ada perusahaan yang melaporkan pengungkapan GRI 206: Perilaku Antipersaingan, GRI 207: Pajak, GRI 306: Efluen dan Limbah, GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok, GRI 402: Hubungan tenaga Kerja/ Manajemen, GRI 410: Praktik Keamanan, GRI 411: Hak Masyarakat Adat, dan GRI 415: Kebijakan publik. Dari penerapan GRI juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan sektor barang konsumen primer dalam topik spesifik ekonomi sangat memperhatikan kinerja ekonomi dan topik antikorupsi. Sedangkan dalam topik lingkungan, perusahaan-perusahaan barang

konsumen primer cukup memperhatikan penggunaan dan pengelolaan, dan efisiensi air dan energi, pengurangan emisi dan pengelolaan limbah. Dan dalam topik sosial khususnya tenaga kerja atau SDM, semua perusahaan barang konsumen primer memperhatikan kesejahteraan dan pelatihan tenaga kerja, sistem dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, kesetaraan dan keadilan tenaga kerja. Sebagai perusahaan-perusahaan yang produknya paling sering dijumpai sebagai kebutuhan primer masyarakat, perusahaan-perusahaan sampel juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat dan kesehatan dan keselamatan pelanggan. Beberapa diantara laporan keberlanjutan masi memiliki ketidaksesuaian dengan *GRI Standards* namun secara keseluruhan penyampaian laporan keberlanjutan sudah membahas terkait topik-topik material.

Selama proses pengumpulan dan pengolahan data, terdapat beberapa keterbatasan dalam menyusun penelitian ini diantaranya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti, keterbatasan informasi dari laporan keberlanjutan perusahaan yang isinya kurang lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian sehingga peneliti mengalami beberapa kendala dalam mengolah data. Pada Indeks GRI di laporan keberlanjutan Garudafood tahun 2021 juga tidak memiliki rincian nomor halaman dalam pengungkapan GRI nya sehingga hal ini menjadi sebuah keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti.

Sebagai pemimpin pasar dalam sektor barang konsumen primer, kelima perusahaan ini tentunya dapat menjadi *benchmark* bagi perusahaan-perusahaan lain dan merepresentasikan sektor barang konsumen primer. Oleh sebab itu perlu penyusunan laporan keberlanjutan usaha yang lebih jelas dengan pengungkapan-pengungkapan sesuai dengan standar acuan penyusunan laporan keberlanjutan yang digunakan perusahaan agar informasi-informasi laporan keberlanjutan dapat menjadi lebih relevan bagi para pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Breliastiti, R. (2021). Penerapan Standar GRI Sebagai Panduan Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Dan Non-Primer Di Bursa Efek Indonesia. *Ekobisman-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 138-156.
- Bursa Efek Indonesia (2023, Mei 4). <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>
- Eagle High Plantations (2023, Mei 4). Eagle High Plantations Sustainability Report 2021. <https://www.eaglehighplantations.com/en/investor/keberlanjutan>
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Feliyanti, C. (2022). Analisis Penilaian Materialitas Laporan Keberlanjutan Pada 15 Perusahaan Multifinance. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 40–52. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.814>

Garudafood Putra Putri Jaya (2023, Mei 4). Garudafood Putra Putri Jaya Annual Report 2021.
<https://garudafood.com/annual-report-ida>

Global Reporting Initiatives (2023, Mei 4). Global Reporting Initiatives 2020.
<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>

H.M. Sampoerna (2023, Mei 4). H.M. Sampoerna Annual Report and Sustainability Report 2021.
<https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure/reports-and-filings>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber Alfaria Trijaya (2023, Mei 4). Alfamart Annual Report and Sustainability Report 2021.
<https://alfamart.co.id/storage/annual-report/April2022/PewjROZOxPeJtkvZPj4u.pdf>

Unilever Indonesia (2023, Mei 4). Unilever Indonesia Sustainability Report 2021.
<https://www.unilever.co.id/hubungan-investor/publikasi-perusahaan/sustainability-report/>